

***THE EFFECT OF THE APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS AND ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS IN BANDUNG CITY***

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KOTA BANDUNG**

**Shafa salsabila Arafani<sup>1</sup>, Usman Sastradipraja<sup>2</sup>**

Universitas Jenderal Achmad Yani<sup>1,2</sup>

Shafasalsabila20p105@ak.Unjani.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This study analyzes the effect of the Application of Government Accounting Standards and Accounting Information Systems on the Quality of Bandung City Financial Statements. The analytical method used is multiple linear regression analysis, which is to determine the effect of two independent variables on one dependent variable which is then carried out t hypothesis test and F hypothesis test to determine the significance level of the effect. The population of this research is SKPD in Bandung City. Sampling was carried out using nonprobability sampling techniques taken from 30 SKPD. Each SKPD was sampled as many as 2 to 3 people, so that the total sample obtained was 80 respondents. The results showed that there was a negative effect on the application of government accounting standards on the quality of financial reports in Bandung City as indicated by the original sample t-statistic value of 2.935 while the f-statistic was 91.928, while the effect between AIS on the quality of financial reports had a positive and significant effect as indicated by the original sample t-statistic value of 5.088 while the f-statistic was 91.928 with a percentage effect of 70.5%, while the other 29.5% was a factor outside this research model.*

**Keywords :** Government Accounting, Accounting Information Systems, Quality of Financial Statements

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Bandung. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen yang kemudian dilakukan uji hipotesis t dan uji hipotesis F untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruhnya. Populasi penelitian ini adalah SKPD di Kota Bandung. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik nonprobability sampling yang diambil dari 30 SKPD. Masing-masing SKPD tersebut diambil sampel sebanyak 2 sampai 3 orang, sehingga total sampel yang diperoleh sebanyak 80 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara negatif pada penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Kota Bandung yang ditunjukkan dengan nilai original sampel t-statistik sebesar 2,935 sedangkan f-statistik sebesar 91,928, sedangkan pengaruh antara SIA terhadap kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan yang ditunjukkan dengan nilai original sampel t-statistik sebesar 5,088 sedangkan f-statistik sebesar 91,928 dengan persentase pengaruhnya sebesar 70,5%, sedangkan sebesar 29,5% lainnya merupakan faktor diluar model penelitian ini.

**Kata Kunci :** Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan

**PENDAHULUAN**

Laporan keuangan mengacu pada data sistematis yang meringkas transaksi keuangan dan berbagai transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas tertentu selama periode audit dan digunakan untuk menggambarkan hasil operasional entitas tersebut. Data dan informasi merupakan dua konsep yang dapat digunakan untuk menggambarkan transaksi keuangan.

Data dari laporan keuangan menggambarkan situasi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Hasil pelaporan keuangan departemen atau lembaga bertujuan untuk menunjukkan tanggung jawab entitas atas sumber daya yang digunakan dalam pengambilan Keputusan (Khairudin et al., 2019).

Laporan keuangan biasanya membantu para pemangku kepentingan

dalam membuat dan menilai kebijakan penggunaan sumber daya dengan memberikan informasi mengenai catatan keuangan, hasil neraca, arus kas, dan kinerja keuangan dari unit pelaporan. Laporan keuangan pemerintah disusun dan disajikan dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan dibentuknya SAP, yaitu untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan antar periode dan perusahaan secara umum. Standar akuntansi pemerintah menguraikan semua faktor yang harus diperhitungkan ketika menyajikan laporan keuangan, termasuk struktur dan isi minimumnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum disajikan sesuai dengan standar, akuntansi pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa

Data keuangan harus dapat diperbandingkan, diandalkan, relevan, dan dipahami. Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara disahkan oleh pemerintah, untuk menyempurnakan pengelolaan anggaran. Standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan diikuti dalam penyusunan dan penyajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menggantikan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dikeluarkan oleh pemerintah (Rachman dkk., 2023).

Ketika mengambil keputusan, beberapa pemangku kepentingan mendasarkan pilihan mereka pada laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena informasi harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus fokus pada data

laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dalam melakukan suatu perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan.

Kumpulan bagian-bagian informasi yang disusun dari data yang belum diolah menjadi data keuangan untuk pelaporan dan pengambilan keputusan disebut sistem informasi akuntansi. Konsep sistem informasi akuntansi pemerintah daerah selaras dengan sistem akuntansi keuangan (SAP). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah adalah sistem yang menyimpan, menatausahakan, dan mengolah data keuangan daerah, sesuai dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Salah satu cara untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan menciptakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang akurat dan berkualitas tinggi sesuai dengan sistem informasi akuntansi dan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan. BPK RI memberikan opini audit atas temuan pemeriksaan laporan keuangan dalam empat tingkatan sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004. Tingkatan tersebut meliputi :

1. Pendapat yang wajar tanpa pengecualian
2. Pendapat yang wajar dengan pengecualian.
3. Tampaknya sebaliknya
4. Opini tidak memberi opini

Opini WTP yang belum diterima oleh BPK disebabkan oleh pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dianggap belum lengkap. Ada banyak alasan mengapa BPK dapat dipercaya. Ini termasuk:

1. Ketidak sempurnaan sistem pengendalian internal
2. Kejanggalan transaksi barang milik negara dan daerah

3. Ketidaksesuaian pelaksanaan pembelian barang dan jasa dengan peraturan yang berlaku
4. Kurangnya sumber daya manusia pengelola keuangan pemerintah daerah

Anggapan berbeda pendapat dengan PAC mengenai laporan keuangan pemerintah mempunyai dua akibat, yaitu kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan program kerja pemerintah dan munculnya gagasan atau gagasan masyarakat. Menurut WTP, pemerintah daerah telah menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku umum,

Keterbukaan yang tepat, dan mematuhi peraturan perundang-undangan dengan baik. Pengendalian internal dianggap efektif dan kesalahan yang ditemukan dianggap kecil serta tidak berdampak signifikan terhadap pengambilan keputusan. Namun, sebenarnya tidak terdapat korelasi yang signifikan antara opini audit keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

Audit merupakan suatu tindakan yang melakukan perbandingan antara keadaan atau fakta sebenarnya dan keadaan saat ini. Tujuan audit adalah untuk menilai apakah pelaksanaan keuangan pada suatu perusahaan atau instansi telah sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan dari opini audit adalah untuk membuktikan bahwa laporan keuangan yang disajikan adalah benar. Umumnya, pada laporan audit dibuat indikator keterbatasan laporan keuangan karena informasi hasil pemeriksaan harus lebih lengkap, akurat, dan tidak memihak. Laporan keuangan yang mendapat WTP semakin meningkatkan kepercayaan DPR, DPRD, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya .

Strategi mempertahankan opini WTP dilakukan dengan cara mencapai tujuan dengan melihat situasi internal dan eksternal secara objektif untuk

memprediksi perubahan lingkungan eksternal. Strategi yang diciptakan dengan cara tersebut dapat mengidentifikasi kebijakan yang sesuai kondisi saat ini. Kebijakan dapat dibuat untuk menentukan apa yang akan dilakukan jika terdapat perbedaan antara aturan dan ketentuan. Strategi yang diciptakan perlu mencakup pembuatan rencana aksi dan pembentukan unsur pendukung lainnya.

Hal ini dicapai dengan menghadirkan cara-cara baru untuk memperoleh umpan balik terhadap CAP, seperti pembuatan komite pengarah, pembentukan tim, pembuatan rencana aksi, penyusunan anggaran, perbaikan sistem pengendalian internal, penyempurnaan sistem akuntansi keuangan dan informasi daerah mengenai pengelolaan barang, peningkatan sumber daya manusia, optimalisasi peran APIP serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi (Khairudin dkk., 2019).

Salah satu daerah yang mengalami peningkatan dan penurunan opini kualitas laporan keuangan adalah Kota Bandung. Hal ini dapat terlihat pada opini audit Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

**Tabel 1. Fenomena Kualitas Laporan Keuangan di Kota Bandung**

No	Tahun	Opini BPK
1	2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	2022	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber: LHP LKPD Kota Bandung  
2016 – 2022

Dari data yang bersumber dari BPK dapat terlihat bahwa sepanjang tahun 2016 – 2022, terjadi kenaikan dan penurunan kualitas laporan keuangan pada Kota Bandung. Kenaikan dan penurunan kualitas laporan keuangan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi pada Kota Bandung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh kedua faktor tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pada Kota Bandung.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif menggunakan model regresi berganda. Data primer adalah data yang telah diolah dan dipublikasikan. Penelitian ini akan menggunakan data dari kuesioner dengan narasumber dari Departemen Keuangan dan Aset Kota Bandung dan lembaga terkait lainnya. Populasi pada penelitian ini, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dari tersebut akan diambil 80 sampel dengan model pengambilan sampelnya menggunakan *nonprobability sampling*.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 80 responden. Selain itu, data juga didapatkan dengan cara observasi atau pengamatan langsung di lapangan.

Sikap, keyakinan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu fenomena diukur dengan menggunakan skala Likert. Peneliti menggunakan skala Likert untuk mengetahui jawaban responden. Lima alternatif jawaban disediakan oleh peneliti dan setiap alternatif jawaban memiliki skornya masing-masing. Berikut skor yang diberikan pada kelima alternatif jawaban:

1. Sangat tidak setuju (1)
  2. Tidak setuju (2)
  3. Kurang setuju (3)
  4. Setuju (4)
  5. Sangat setuju (5)
- (Sugiyono, 2018:93)

Data yang didapatkan dari responden masih dalam bentuk data ordinal. Data ordinal yang didapatkan akan diubah menjadi data interval atau dikenal sebagai pengolahan data Method of Successive Interval (MSI). Pada kenyataannya, data ordinal lebih merepresentasikan informasi kualitatif daripada data numerik. Angka digunakan sebagai simbol data kualitatif pada data ordinal (Ley 25.632, 2002)

Peneliti menggunakan dua Teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

##### **A. Metode Dokumentasi**

Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan peraturan atau dokumen yang ada yang akan diperlukan untuk penelitian, terutama untuk memeriksa esensi dari masalah tersebut.

##### **B. Telaah Koesioner**

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diisi. Dengan demikian, kuesioner penelitian ini berfokus pada kualitas laporan keuangan (Y), pemanfaatan sistem informasi akuntansi (X2), dan penerapan aturan akuntansi pemerintah (X1).

Analisis regresi linier berganda dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana dua atau lebih variabel independen mempengaruhi variabel dependen. (Sugiyono 2019:230) menyatakan bahwa rumus regresi berganda untuk dua atau lebih variabel independen adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	80	20	55	42.60	6.852
X2	80	15	40	31.07	5.257
Y	80	25	55	43.05	6.439
Valid N (listwise)	80				

Sumber : Hasil *output*SPSS 25 (Diolah 2024)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, variabel independen standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai minimum 20 dan nilai maksimum 55, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Rata-rata standar akuntansi pemerintah cukup tinggi dengan nilai minimum dan maksimum yang berdekatan, dan variasinya lebih kecil dari rata-rata, sesuai dengan nilai rata-rata 42,60 dan standar deviasi 6,852. Selain

itu, variabel independen sistem informasi akuntansi memiliki nilai minimum 15, nilai maksimum 40, nilai mean 31,07, dan standar deviasi sebesar 5,527. Keduanya berada di bawah nilai rata-ratanya. Artinya, rata-rata sistem informasi akuntansi relatif kecil mengingat perbedaan yang mencolok antara nilai rata-rata dan nilai maksimum.

Selain itu, variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan memiliki nilai minimum 25 dan nilai maksimum 55. Standar deviasi sebesar 6,439 dan mean sebesar 43,05. Nilai-nilai ini berada di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kualitas laporan keuangan relatif rendah karena perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata dan nilai maksimum. Varians data juga relatif rendah karena perbedaan yang signifikan antara mean dan standar deviasi.

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

No	Uji Asumsi klasik	Hasil	Keputusan
1	Uji Normalitas Data	Asymp Sig (2-tailed) value 0,193	Distribusi data normal
2	Uji Multikolinearitas	TA VIF value; CI; PC = 3,180;3,180 < 10 TA Tolerance Value; CI; PC tas. = 2,835;5.088 > 0.1	Tidak terjadi multikolineari
3	Uji Heterokedastisitas	Sig CI;PC = 0,079;0,189 > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
4	Uji Autokorelasi	Durbin-Watson value = 2,168 dU<dW<4-dU = 1,6882<2,168<2,3118	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Hasil *output*SPSS 25 (Diolah 2024)

Seperti yang dapat dilihat dari tabel 4.13 di atas, hasil Kolmogorov-Smirnov dari Asymp Sig (2-tailed) menampilkan nilai 0,193, atau nilai yang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa data residual

pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji multikolinearitas merupakan uji asumsi klasik selanjutnya. Nilai tolerance untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dan variabel Sistem Informasi Akuntansi masing-masing

sebesar 2,835 dan 5,088 sesuai dengan tabel 4.14 di atas. Nilai tolerance kedua variabel tersebut lebih besar dari 0,10 sehingga memenuhi batas toleransi. Untuk VIF pada variabel-variabel tersebut juga demikian. Selanjutnya, nilai VIF kedua variabel tersebut telah mencapai nilai VIF kurang dari 10. Sehubungan dengan hasil tersebut, hasil ini mengarah pada kesimpulan bahwa data penelitian ini tidak menunjukkan adanya multikolinearitas.

Variabel independen intensitas modal digunakan untuk melakukan uji Glejser pada nilai, seperti yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya menghasilkan nilai sig sebesar 0,189 dari

sig 0,079. Setelah itu ditentukan bahwa data tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas karena angkanya lebih dari 0,05.

Pada uji autokorelasi, nilai Durbin Watson (DW) adalah 2,168. Berikut adalah penjelasan untuk nilai ini:

$$dU < DW < 4 - dU$$

$$1,6882 < 2,168 < 4 - 1,6882$$

$$1,6882 < 2,168 < 2,3118$$

Berdasarkan hasil perhitungan, tidak ada autokorelasi positif maupun negatif dalam keputusan penelitian ini untuk tidak menolak. Temuan ini menunjukkan bahwa autokorelasi tidak ada dalam penelitian ini.

**Hasil Analisis Regeresi Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	9.135	2.568	2.568	3.557	.001
SAP	.294	.104	.313	2.835	.006
SIA	.688	.135	.562	5.088	.000

Sumber: Hasil *output* SPSS 25 (Diolah 2024)

Kedua variabel independen memengaruhi variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan, berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas. Berikut adalah penjelasan tentang pengaruh masing-masing variabel terhadap persamaan sebelumnya :

- a. Koefisien kualitas laporan keuangan SKPD Kota Bandung sangat tinggi, dengan nilai konstan 9,135. Variabel dependen akan berubah jika tidak ada variabel independen.
- b. Koefisien Standar Akuntansi Pemerintah (X1) menunjukkan angka

sebesar 0,294. Hal ini menandakan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah berdampak positif pada kualitas laporan keuangan.

- c. Variabel Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sesuai dengan nilai koefisien Sistem Informasi Akuntansi (X2) sebesar 0,688.
- d. Berdasarkan tabel sebelumnya, persamaan regresi linier berganda dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$Y = 9,135 - 0,294X1 - 0,688X2 + \epsilon$$

**Hasil Analisis Koefisiensi Korelasi**

**Correlations**

			SAP	SIA	KLK
Standar Akuntansi Pemerintahan	Pearson Correlation		1	.828	.778**

		Sig. (2-tailed)	.000	.000
		N	80	80
Sistem Informasi Akuntansi	Pearson Correlation		.828	1
		Sig. (2-tailed)	.000	.000
		N	80	80
Kualitas Laporan Keuangan	Pearson Correlation		.778**	.821**
		Sig. (2-tailed)	.000	.000
		N	80	80

Sumber : Hasil *output* SPSS 25 (Diolah 2024)

Berdasarkan table di atas, hasil uji korelasi parsial antara Standar Akuntansi Pemerintahan dengan koefisien korelasi sistem informasi akuntansi masing-masing menunjukkan angka sebesar

0,778 dan 0,821. Hal ini menandakan bahwa terdapat hubungan yang searah antara kedua variabel tersebut.

**Hasil Analisis Koefisiensi Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.840 <sup>a</sup>	.705	.697

a. Predictors: (Constant), SIA, SAP

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Hasil *output* SPSS 25 (Diolah 2024)

Tabel menampilkan nilai R Square sebesar 70,5%. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi memiliki kekuatan sebesar 70,5% dalam memprediksi kualitas laporan keuangan. Sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

**Hasil Analisis Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)**

B	Std. Error	Beta	T	Sig
9,1353,568			3,557	.001
294	.104	313	2,835	.006
688	.135	562	,088	.000

Sumber: Hasil *output* SPSS 25 (Diolah 2024)

Tabel T dengan rumus signifikansi ( $\alpha/2$ ;  $n-k-1$ ) ditunjukkan pada tabel di atas. Ini menghasilkan nilai 1,66488 dengan derajat kebebasan  $df = n-k-1$ , di mana  $n$  adalah jumlah variabel independen dan  $k$  adalah jumlah data, dan  $df = 80-2-1 = 77$ .

a. Pengujian Variabel Standar Akuntansi Pemeintahan

Mengingat  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima pada tabel di atas, maka variabel Standar Akuntansi Pemerintahan ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kesimpulan ini didukung oleh nilai T hitung sebesar 2,835 dan nilai T tabel sebesar 1,66488, serta hasil signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05.

b. Evaluasi Variabel Sistem Informasi Akuntansi

Dengan nilai T hitung sebesar 2,538 dan nilai T tabel sebesar 1,66488, variabel

Sistem Informasi Akuntansi (X2) pada tabel di atas menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak, dengan tingkat signifikansi 0,000 di bawah 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan

bahwa komponen-komponen tertentu dari Sistem Informasi Akuntansi memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

### Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji f)

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2308.846	2	1154.432	91.928	.000 <sup>b</sup>
	Residual	966.954	77	12.558		
	Total	3275.800	79			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), SIA, SAP

Sumber: Hasil *output*SPSS 25 (Diolah 2024)

Berdasarkan tabel sebelumnya, nilai F hitung yang diperoleh adalah 91,928. Angka ini kemudian dibandingkan dengan tabel distribusi F sebesar 3,11 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian,  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan kata lain, kualitas pelaporan keuangan di SKPD Kota Bandung dipengaruhi oleh aturan akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi secara bersamaan.

### PEMBAHASAN

#### Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara negatif oleh Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,935 > 1,66488$ , dan besarnya pengaruh variabel Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan nilai signifikansi  $0,006 > 0,05$ . Karena  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, maka Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kualitas

laporan keuangan. Kesimpulan penelitian yang didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 membahas tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan LKPD. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan LKPD yang sangat penting bagi sektor publik dan juga pemerintah secara luas.

#### Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara positif oleh sistem informasi akuntansi. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya pengaruh variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $5,088 > 1,66488$ . Karena  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, maka Standar Akuntansi Pemerintahan dengan demikian memiliki

pengaruh yang positif dan cukup besar terhadap kualitas laporan keuangan. mekanisme data akuntansi untuk menciptakan laporan keuangan yang akurat. Konsep sistem informasi akuntansi dilihat dari berbagai sudut pandang.

### **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sistematika akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi berdampak pada kualitas laporan keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $91,928 > 3,11$ . Besarnya pengaruh dari variabel independen oleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka, Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian ini menurut Relevan, dapat dipercaya, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan adalah ciri-ciri laporan keuangan pemerintah yang berkualitas tinggi, sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi dalam Laporan keuangan pemerintah daerah harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan standar tentang nilai informasi. Jika tidak sesuai dengan undang-undang, itu dapat menyebabkan kerugian daerah yang besar, kelemahan administrasi, dan waktu yang tidak efisien dan tidak efektif.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Hasil dari simulasi dan analisisnya dapat dirangkum menjadi beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kota Bandung berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai hitung yang lebih besar daripada nilai tabel, serta signifikansi

yang menunjukkan bahwa pengaruh SAP tidak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan. Dapat disimpulkan bahwa SAP tidak meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Penemuan ini bertentangan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang mengindikasikan bahwa penerapan SAP justru berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

2. Penerapan sistem informasi akuntansi di Kota Bandung berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan nilai hitung yang jauh lebih besar dari nilai tabel dan signifikansi yang dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini mendukung pandangan sistem informasi akuntansi, yang mencakup berbagai komponen seperti sumber daya manusia, alat, data, dan informasi, sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan bernilai. Dengan demikian, penerapan sistem informasi akuntansi yang efektif dapat menjadi keuntungan besar bagi organisasi pemerintahan.
3. Kualitas laporan keuangan Kota Bandung dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas laporan keuangan yang baik ditandai oleh karakteristik relevan, dapat dipercaya, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.
4. Dengan demikian, meskipun Standar Akuntansi Pemerintahan di Kota Bandung tidak menunjukkan hasil yang diharapkan, sistem informasi akuntansi dapat menjadi alat penting

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menggunakan pengujian hipotesis berdasarkan perhitungan statistik uji t (parsial) dan uji (simultan), bahwa secara parsial Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD kota Bandung. Sedangkan secara simultan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD kota Bandung.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian sebagaimana disebutkan sebelumnya, peneliti membuat rekomendasi sebagai berikut :

#### 1. Implikasi Ilmiah

Peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan secara geografis yang tidak diteliti dalam penelitian ini dengan jumlah sampel yang lebih besar agar dapat mempresentasikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

Lalu, teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan uji regresi berganda yang hanya dapat menggambarkan hubungan antar variabel. Sehingga, peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode analisis *Structural Equation Model* (SEM) dimana metode ini merupakan analisis untuk mengetahui hubungan pada indikator yang paling berpengaruh terhadap variabel.

Kemudian peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain mengingat terdapat pengaruh sebesar 78,2% dari variabel lain yang tidak dikut sertakan dalam penelitian ini seperti pemanfaatan teknologi informasi (Aprsiansyah dkk., 2020), auditor internal (Munggaran dk.,

2020), dan sistem akuntansi keuangan daerah (enita binawati, 2022)

Teknologi informasi, auditor internal, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

#### 2. Implikasi Manajerial

Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan solusi atas masalah penelitian yaitu penurunan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa secara simultan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akrual, n.d.; Chairina & Wehartaty, 2019; Gusherinsya & Samukri, 2020; Herinda & Sulistiyowati, 2023; Ikriyati & Aprila, 2019; Khairudin et al., 2019; Ley 25.632, 2002; Mahartini et al., 2021; Novita Yanti, Rofiqoh Ferawati, 2022; Pilander et al., 2018; Rachman et al., 2023; Rohmah et al., 2020; Siahaan & Simanjuntak, 2020; Suprihatin & Ananthi, 2019; Sutra & Prabawa, 2020; Yanti et al., 2020)Akrual, K. B. (n.d.). *No Title. Nim 145020301111059*.
- Chairina, F., & Wehartaty, T. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bpkpd Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 11(1), 31–39. <https://doi.org/10.33508/jako.v11i1.2073>
- Gusherinsya, R., & Samukri, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 58–68. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.94>

- Herinda, D. Y. P., & Sulistiyowati, F. (2023). RUAL, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DINAS DAERAH, DAN GOOD PUBLIC GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS (JMB)*, 23(September), 196–200.
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Khairudin, K., Pratiwi, T. R., & Daud, S. (2019). Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Beropini WTP, WDP, Adverse dan Disclaimer di Propinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.25181/esai.v13i1.1267>
- Ley 25.632. (2002). *jonathan sarwono*. 250–259.
- Mahartini, N. K. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1125–1134.
- Novita Yanti, Rofiqoh Ferawati, K. (2022). Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada organisasi perangkat daerah kabupaten tanjung jabung timur). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3, 1–15.
- Pilander, S. M., Saerang, D. P., & Gamaliel, H. (2018). Pengaruh, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kotamobagu). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 9(2), 128–139.
- Rachman, D., Sofwan, S., & Amelia, S. (2023). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN(Studi Survei Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Arjasari). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14, 134–150.
- Rohmah, L., Noor Shodiq Askandar, & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-Jra, OPengaruh(05)*, 43–51.
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu).

- Jurnal Manajemen*, 6(2), 129–138.
- Suprihatin, N. S., & Ananthi, A. A. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 242. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i2.6218>
- Sutra, M. A. A., & Prabawa, D. K. G. (2020). Pengaruh Efektivitas, Pemanfaatan dan Kesesuaian Tugas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Di Desa Panjer. *TIERS Information Technology Journal*, 1(1), 19–24.
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>